

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TINGKAT
PENGANGGURAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA (STUDI KASUS KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK
MULYOREJO SURABAYA)

Arpi, S.E. dan M. Lukmanul Hakim, M.E.
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
lukmanhakim@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran adalah masalah yang menjadi permasalahan serius di negara kita tercinta. Apabila masalah ini tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi meningkatkan kemiskinan. Maka dari itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Daerah Kelurahan Kejawan Putih Tambak kecamatan Mulyorejo, Surabaya merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga dihadapkan dengan masalah ini. Uniknya, perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu di daerah ini meningkat jumlahnya. Hal itu didukung semakin ramainya jalan yang ada di kelurahan ini karena terhubung langsung dengan kompleks pendidikan serta berbatasan langsung dengan perumahan pakuwon City. Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima ini dirasa ikut membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Maka dari itu kami ingin mengetahui peran pemerintah daerah tersebut dalam menanggulangi pengangguran melalui pemberdayaan pedagang kaki lima.

Adapun peran pemerintah Kelurahan Kejawan Putih tambak dalam menanggulangi pengangguran di kota Surabaya Wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak yaitu dengan memberikan izin kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan Kejawan Putih Tambak. Selain itu pemerintah setempat juga memberikan kenyamanan dan keamanan dengan menyediakan tempat khusus untuk para pedagang kaki lima yang bisa digunakan selama 24 jam. Pemerintah setempat juga mempersilahkan para pedagang kaki lima menyediakan tempat khusus untuk dijadikan pasar malam setiap malam Ahad dan malam Senin.

Kata kunci: pedagang kaki lima, kelurahan kejaan putih tambak

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang selalu tidak mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar negara dunia ketiga terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi pertumbuhan kota-kota tersebut ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan pertumbuhan industrialisasi. Fenomena ini disebut oleh para ahli sebagai, "urbanisasi berlebihan atau *over urbanization*". Istilah ini menggambarkan bahwa tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi melebihi tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat, arus migrasi desa dan kota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migrasi memiliki skill atau kemampuan untuk masuk sektor industri modern.

Para imigran yang tidak dapat masuk sektor industri modern cenderung lebih memiliki industri sektor informal yang relatif mudah untuk dimasuki agar dapat tetap bertahan hidup. Para imigran yang tinggal di kota melakukan aktivitas-aktivitas informal baik yang sah maupun yang tidak sah sebagai mata sumber pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi pengangguran.

Beberapa pekerjaan yang termasuk di sektor informal di antaranya adalah pedagang kaki lima, penjual batagor, penjual bakso, penjual rujak dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan dari semua kalangan tetapi tidak jarang dari mereka

yang berasal dari golongan atas juga ikut menyerbu sektor informal.

Dengan demikian sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan perkotaan karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan. Selain itu sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah kota, namun penanganan yang tidak baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Sebagaimana kita ketahui banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi *publicspace*.

Publicspace merupakan tempat umum di mana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati indahny pemandangan kota. Tempat umum tersebut biasanya berupa taman, trotoar, halte bus dan lain-lain. Trotoar yang digunakan untuk berjualan dapat mengganggu para pejalan kaki sehingga sering kali kehadiran para pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas. Hal itu dikarenakan konsumen atau pengguna jasa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, sehingga ketidakaturan tersebut mengakibatkan *publicspace* terlihat kumuh dan kotor sehingga tidak nyaman lagi untuk bersantai.

Untuk mengatasi masalah sektor informal diperlukan ketegasan dari pemerintah setempat. Selama ini pemerintah hanya melakukan penertiban dalam mengatasi masalah sektor informal, namun hal tersebut tidak efektif karena setelah para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan maka beberapa hari kemudian mereka kembali ke tempat semula untuk berjualan. Selain itu ada kecendrungan tempat yang digunakan untuk berjualan tersebut diperjualbelikan pada orang yang berjualan di lokasi *publicspace* yang merupakan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai melanggar hukum.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah relokasi bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah harus menyediakan tempat yang dapat digunakan mereka untuk menjual dagangannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pedagang kaki lima tidak mengganggu kepentingan umum karena

berjualan di lokasi *publicspace* serta akan menimbulkan perasaan aman mereka tidak perlu khawatir ditertibkan oleh aparat pemerintah. Selain itu pemerintah harus melakukan proteksi bagi pedagang kaki lima sebagai imbalan atas kontribusi yang dilakukan oleh sektor informal. Proteksi tersebut bertujuan agar pedagang kaki lima tersebut tidak kalah saing oleh pedagang besar yang telah memiliki nama, karena apabila mereka kalah bersaing dan sampai gulung tikar akan terjadi pengangguran kesempatan kerja.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor usaha informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor informal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Sejalan dengan uraian di atas dalam UUD nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil disebutkan bahwa pedagang kaki lima termasuk kegiatan usaha yang mampu mengurangi pengangguran dan memperluas pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan pedagang kaki lima secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hal-hal pembangunan¹.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pedagang kaki lima memang tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk perdagangan maupun jasa pelayanannya. Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh daya beli kemampuan masyarakat kecil. Kehadiran para pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kegiatan usaha mereka pada umumnya belum teratur dan tertata dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh ketidakpastian serta terkadang menimbulkan pula gangguan lalu lintas,

¹ Diakses dari <http://HukumOnline.com> (pembangunan ekonomi) pada 9 september 2019 pukul 12.35

kebersihan keindahan, keamanan lalu lintas dan sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan pula kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, khususnya pengusaha ekonomi lemah, maka kegiatan usaha pedagang kaki lima perlu dibina dan diarahkan agar dapat berkembang semakin meningkat serta tidak lagi menimbulkan masalah di bidang keamanan lalu lintas serta keindahan, keamanan dan lain sebagainya².

Daerah perkotaan merupakan wadah pemukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang mempunyai peran penting dalam masyarakat. Perkembangan penduduk kota di negara berkembang tidak saja mencerminkan pertumbuhan alami penduduk kota tetapi juga pertumbuhan arus penduduk dari desa ke kota yang sangat besar. Perpindahan penduduk arus dari desa ke perkotaan yang sedang berjalan di negara berkembang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia. Pada umumnya konsep urbanisasi diartikan sebagai konsep di mana penduduk suatu negara memiliki impian kalau berdiam di pusat perkotaan akan merubah nasib dan mendapatkan kehidupan yang layak sehingga membuat arus urbanisasi di kota kian meningkat setiap tahun.

Adanya urbanisasi ini pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah daerah karena hal ini bukan hanya masalah sosial seperti gelandangan dan sejenisnya, tapi juga berdampak pada masalah kependudukan lainnya. Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal. Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, dan biaya dari diri sendiri sehingga tidak mengherankan banyak jumlah anggota masyarakat memilih usaha tipe ini. Namun dampak positif adanya sektor informal ini adalah masalah pengangguran sedikit demi sedikit dapat diatasi³. Sejak krisis terjadi ekonomi

² Diakses dari <http://eng.uir.ac.id> (keberadaan pkl terhadap lalu lintas) pada 9 september 2019 pukul 13.15

³Johara T.Jayadinata. 1999.*Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah* , hlm 146 Bandung: penerbit ITB

tahun 1997 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan sektor informal salah satunya pedagang kaki lima bisa dilihat di hampir semua kota-kota besar di Indonesia berkembang sangat pesat, terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar sehingga banyak pemutusan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru yang nantinya muncul fenomena baru yaitu pedagang kaki lima menjadi jalan keluar dari pengangguran.

Sebagaimana di kota-kota lainnya di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Surabaya, khususnya di daerah Kelurahan Kejawan Putih Tambak kecamatan Mulyorejo. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu di daerah ini meningkat jumlahnya. Hal itu didukung semakin ramainya jalan yang ada di kelurahan ini karena terhubung langsung dengan kompleks pendidikan serta berbatasan langsung dengan perumahan Pakuwon City. Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima ini dirasa ikut membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Disatu sisi pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Hal inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini⁴.

Dari fenomena di atas maka kami tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Melalui Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kelurahan Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya)”**. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah referensi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui pemberdayaan pedagang kaki lima.

⁴ Diakses dari <http://www.foxitso.com> For evaluation Only (pedagang kaki lima) pada 10 september 2020 pukul 10.11

B. Kajian Pustaka

1. Pemerintah

Pemerintah atau *Government* berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintah negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah tempat usaha mereka. Pemerintah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya. Pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang yang memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. Ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui DPRD⁵.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran juga bermakna keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam katagori angkatan tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, masalah

⁵ Setya Retnami. *Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta 2001, hlm. 8

pertambahan-pertambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar yaitu mereka yang kegiatannya aktif bekerja tetapi secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh⁶.

Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (*unemployment rata*). Yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (*labour force*). Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu. Secara umum pengangguran adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja terhitung sebagai pengangguran, seorang harus melaporkan usaha spesifiknya dalam mencari pekerjaan (seperti melakukan wawancara kerja atau mengirim surat-surat lamaran).

Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat memaksimalkan dan perkonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkelanjutan (*sustained economic growth*). Tingkat pengangguran relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut, hal ini dapat dilihat jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran.

Kelangkaan tenaga profesional dan terampil sering dilihat sebagai dampak dari kelemahan sistem pendidikan nasional, masalah ini sama buruknya dengan masalah pengangguran yang keduanya dinilai bisa terjadi karena kurang tanggapnya atau pekanya pihak penyelenggara pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat industri. Dunia usaha pun cenderung mempersalahkan dunia pendidikan karena belum berhasil memenuhi kebutuhannya secara penuh. Perusahaan-perusahaan dikecewakan karena seolah-olah harus turut menerima getah dari kelemahan sistem pendidikan berupa penempatan tenaga kerja yang kurang terampil. Prijono mengemukakan bahwa lebih dari 50 persen seluruh tenaga kerja yang ada dan telah bekerja pada berbagai jenis usaha khususnya

⁶ Edgar O.Edwerd,*ekonomi pembangunan*,(1974)hlm.34

untuk pekerja tingkat bawah ternyata belum menamatkan SD dan bahkan banyak yang tidak bersekolah sama sekali. Tidak jarang sektor industri terutama yang menggunakan teknologi madya apalagi teknologi canggih untuk menggunakan tenaga kerja asing, karena langkahnya tenaga terampil teknis menengah sehingga pedagang kaki lima diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang tengah menganggur⁷.

Penyebab utama pengangguran adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap kedalam lapangan kerja yang ada faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja bukan pencipta kerja⁸.

Pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran sebagai berikut:

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara lowongan pekerja dengan pencari kerja masuk serta stabilitas tenaga kerja, didalam pengangguran friksional perputaran atau tenaga kerja yang keluar masuk serta stabilitas tenaga kerja relatif tinggi, disini perlu diadakan informasi yang lebih sering dan lengkap pada pencari kerja serta pada mereka yang membutuhkan tenaga kerja.

b. Pengangguran Siklinal

Pengangguran yang menganggur akibat dari imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada pencari kerja.

c. Pengangguran Struktural (*structural unemployment*)

⁷ Ronal Nangoi. *Perkembangan Produksi dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 1994) hlm.142

⁸ Sukanto Reksohadiprojo dan A.R Karseno . *Ekonomi Perkotaan* (Yogyakarta 2008) hlm.71

Keadaan dimana penganggur yang sedang mencari pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin.

3. Faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Pengangguran.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja. Ketidakcocokan ini bersifat geografis, jenis pekerjaan orientasi status atau masalah keahlian khusus.
- b. Terbatasnya daya serap tenaga kerja disektor formal (tenaga kerja terdidik) yang jumlahnya cukup besar memberikan tekanan yang kuat terhadap kesempatan kerja di sektor informal yang jumlahnya relatif kecil.
- c. Budaya malas juga sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran.

Untuk mengurangi pengangguran secara frontal di semua sektor, yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar, sebuah kebijakan anti pengangguran yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan.

Jika inisiatif kreatif dari rakyat yang diwujudkan dalam usaha PKL sebagai terobosan mereka untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga keluarganya, yang

diperlukan oleh mereka adalah adanya penataan, pembinaan dan pemberdayaan (3P) yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota maupun pihak mereka sendiri (PKL) melalui suatu wadah paguyuban 3P disini juga berarti pemberian pengarahan, pengetahuan dan pengertian tentang fungsi dan keberadaan mereka sebagai PKL.⁹ Dengan dilakukan 3P, berarti ada usaha untuk menata / mengatur mereka dalam rangka peningkatan peranan PKL dan selain itu mereka tidak lagi berkonotasi sebagai pengganggu pengguna fasilitas umum. Untuk menjadikan PKL tetap eksis ditengah persaingan usaha kuliner dengan pemodal besar sebenarnya ada dua faktor yang perlu dikaji. Pertama, kesuksesan bagi PKL tidak terlepas dari faktor internal PKL.

Faktor internal yang dimaksud adalah selain sebagaimana diulas dalam penelitian Karna, dkk tentang peran paguyuban PKL, juga berdasarkan hasil studi ini Paguyuban PKL telah menjalankan berbagai program atau kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan pembinaa kebersihan,keindahan,keamanan,dan keindahan lokasi.
- b. Kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran para anggota dalam berkoperasi. Hal ini dimanfaatkan sebagai salah satu wadah untuk memfasilitasi pemberian bantuan modal bagi para PKL yang mengalami kesulitan.
- c. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan peraturan-peraturan Pemerintah yang terkait erat dengan aktifitas usaha PKL.
- d. Pembinaan untuk meningkatkan keahlian / manajemen dalam menjalankan usaha.
- e. Menumbuhkan rasa solidaritas, kebersamaan dan saling tolong menolong.

⁹ <http://media.neliti.com/pdf> diakses pada 15 februari 2021 pukul 12:30

4. Peran pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Ada beberapa upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi pengangguran, yaitu:

- a. Menciptakan pekerjaan yang seluas-luasnya
- b. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
- c. Mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
- e. Pengembangan sektor informal
- f. Pengembangan program transmigrasi
- g. Meningkatkan investasi

Dari beberapa upaya tersebut pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang butuh pekerjaan.

5. Definisi Pedagang Kaki Lima

Secara etimologi pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat fasilitas umum¹⁰. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah pedagang kaki lima ada lima dan juga sering diartikan dengan kata “murah”.

Kehadiran pedagang kaki lima sudah ada sejak zaman Letnan Thomas Stamford Raffles. Atas perintah Raffles, trotoar selebar kaki lima (*five food way*) atau sekitar 1,5 m dibuat untuk pejalan kaki oleh pemilik gedung di jalan utama Batavia. Seorang pengamat politik Indonesia dari Ohio State University, William Liddle, dalam buku pedagang yang berkaki lima, menyebutkan kebijakan trotoar lima kaki ini diterapkan juga di *chinatown* saat bertugas di Singapura pada tahun 1819. Pemahaman pedangan kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah

¹⁰<http://id.m.wikipedia.org> pada 5 februari 2021

disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota. Fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap (Permendagri nomor 41/2012 pasal 1)¹¹.

Untuk lebih jelasnya, kegiatan pedagang kaki lima dalam sektor ekonomi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha.
- c. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak menyentuh ke sektor tersebut.
- e. Unit usaha mudah masuk dari sub sektor ke sektor lain.
- f. Teknologi yang digunakan bersifat tradisional.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil.
- h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak membutuhkan pendidikan khusus.
- i. Pada umumnya unit usaha termasuk “*one man enterprises*” dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- j. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi.
- k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi untuk masyarakat golongan berpenghasilan rendah dan juga terkadang menengah.

¹¹ <http://jdih.baliprov.go.id> pada 5 februari 2021

- l. Menggunakan sumber daya dengan baik, karena para pekerja suatu perokonomian
- m. Adalah sumber daya utamanya, menjaga agar para pekerja tetap bekerja menjadi
- n. Puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi, tingkat pengangguran adalah
- o. Statistik yang mengukur persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak
- p. Mempunyai pekerjaan

C. Sajian dan Analisa Data

1. Sejarah¹²

Awal mula didirikannya kantor Kelurahan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya, berawal dari adanya perkembangan wilayah yang mana pada zaman dahulu ada sekelompok istilah yang bernama *minie seppu* yang membuka lahan di mana pada awalnya adalah rawa-rawa atau sungai kecil sehingga menjadi perkampungan yang jumlah penduduknya sedikit. Pada awalnya Kelurahan Kejawan Putih Tambak mengikuti wilayah Kecamatan Sukolilo. Karena adanya pemantuan wilayah yaitu peraturan dari Pemerintah Kota Surabaya akhirnya Kecamatan Sukolilo yang pada awalnya mempunyai wilayah yang luas, kini dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukolilo dan kecamatan Mulyorejo. Dari kecamatan Mulyorejo tersebut dikembangkan menjadi Kelurahan Kejawan putih Tambak.

Awal mula dibentuk menjadi nama Kejawan Putih Tambak yaitu adanya para kumpulan nelayan dan perantau di mana para nelayan tersebut membuat sebuah komunitas yang bernama Kejawan Putih Tambak karena berdekatan dengan selat dan sebagian besar adalah wilayah tambak.

¹² Wawancara , Purwo Suprpto (Staf Sekertaris Office KEL.KJWP) Tanggal 25 juni 2021.

Kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak didirikan oleh pemerintah kota Surabaya, untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Kejawan Putih tambak. Adapun untuk luas kantor kelurahan kejawan putih tambak sendiri kurang lebih 1000 km².

2. Profil Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya

a. Visi dan misi Kelurahan Kejawan Putih Tambak¹³

Visi : Kecamatan Mulyorejo cerdas danpeduli

Misi: Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mulyorejo yang berkarakter pancasila, mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global, mewujudkan kompetensi SDM Kecamatan Mulyorejo dalam rangka menghadapi globalisasi, mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif, mewujudkan penataan ruan dan terigterasi dan memperhatikan daya dukung kota, mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram,tertib dan sadar hukum.

Motto : Giving the best (memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kelurahan kejawan putih tambak).

b. Pelayanan¹⁴

Maklumat pelayanan, sanggup melayani secara profesional santun dan akan selalu meningkatkan pelayanan sesuai prosedur.

3. Legalitas ¹⁵

Kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak berdiri pada tahun 2002 dengan nama kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya dan beralamat di jalan Kejawan Putih Tambak No. 48, Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, kota SBY Jawa Timur 60112.

¹³ Office KEL.KJWNP,” Standar Pelayanan Publik

¹⁴ Office KEL.KJWNP,” Standar pelayanan publik

¹⁵ Wawancara , Purwo Suprpto (staff sekretaris office KEL. KJWNP) Tanggal 25 juni 2021

4. Gambaran Umum Kota Surabaya Kelurahan Kejawan Putih

Tambak.

Wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak berbatasan dengan wilayah lain, yaitu sebelah utara berbatasan Kelurahan Kalisari, sebelah selatan dengan Kelurahan Gebang Putih, sebelah barat dengan kampus ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), dan sebelah timur Selat Madura.

Wilayah kelurahan kejawan putih tambak secara administratif terdiri dari 4 RW dan 24 RT. Secara morfologis Kelurahan Kejawan Putih Tambak terletak di Surabaya bagian timur¹⁶.

Untuk luas wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak mencapai 3.014 hektar yang mana dihuni oleh 7000 penduduk.

5. Jumlah kepadatan penduduk

Penduduk mempunyai fungsi sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi, distribusi barang dan jasa sebagai sarana untuk menimbulkan serta mengembangkan pasar sehingga proses produksi dan distribusi barang dan jasa dapat berjalan terus menerus dalam jangka panjang.

Untuk dapat mengetahui kepadatan penduduk dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 1.1

Kepadatan penduduk

No	RT- RW	Kepadatan penduduk
1	RW 01, RT 1- RT 6	2500
2	RW 02, RT 1 – RT 5	1800
3	RW 03, RT 1- RT 4	900
4	RW 04, RT 1- RT 5	1800

¹⁶ Wawancara , Abdul Nasir (Staff Adminitrasi office KEL.KJWNP) Tanggal 8 juni 2021

5	Jumlah	7000
---	--------	------

Sumber: office kelurahan kejawan putih tambak 2015-2020

Dari table diatas bahwa RT yang paling banyak penduduknya adalah RW 1 RT 1- RT 6 yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 2500 orang, RW 2 RT 1- RT 5 dengan jumlah penduduk sebesar 1800 orang dan RW 3 RT 1 - RT 4 mempunyai penduduk sebesar 900 orang, RW 4 RT 1- RT 5 mempunyai penduduk sebesar 1800 orang.

6. Lapangan pekerjaan penduduk

Untuk mengetahui karakteristik lapangan pekerjaan penduduk Daerah Keluraha Kejawan Putih Tambak surabaya dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.2

Lapangan pekerjaan penduduk

No	Lapangan pekerjaan	Penduduk
1	Karyawan	97
2	Wiraswasta	652
3	Tani	31
4	Pertukangan	50
5	Pensiunan	35
6	Pemulung	40
7	Nelayan	35
8	Jasa	150

Sumber : office kelurahan kejawan putih tambak tahun 2015-2020

Aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui suatu distribusi penduduk). yang bekerja menurut lapangan usaha. Berdasarkan table 1.2 tampak bahwa di kota surabaya kelurahan kejawan putih tambak umumnya sebagian besar penduduknya bekerja

disektor wiraswasta (652 orang), dan jasa sebesar (150 orang), sedangkan sektor karyawan menyerap tenaga kerja sebesar (97 orang

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum keadaan ekonomi kota surabaya kelurahan kejawan putih tambak meningkat. Hal ini tampak bersamaan dengan terjadinya pergeseran lapangan pekerjaan penduduk dimana proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung berkurang dan masuk ke sektor jasa dan wiraswasta.

7. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Salah satu solusi agar tidak terjadi pengangguran di daerah kejawan Putih tambak adalah dengan menjadi pedagang kaki lima. Ini di antara beberapa wawancara kami kepada Pedagang Kaki Lima di daerah tersebut:

“Pedagang Kaki Lima merupakan peluang usaha yang sangat cocok untuk kalangan ekonomi lemah yang mana memiliki usaha sendiri dan apabila usaha yang dijalankan sudah berkembang ini juga membantu penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran¹⁷. “ keterbatasan lapangan kerja serta susahnya bekerja disektor formal merupakan alasan utama memilih bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga¹⁸. “ sulitnya mencari pekerjaan yang layak karna keterbatasan pendidikan dan skill yang dibutuhkan¹⁹.

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang mereka geluti telah mampu memenuhi kebutuhan mereka dan bisa dikatakan dapat menanggulangi tingkat pengangguran yang lebih

¹⁷ Wawancara, bapak Burhan 47 tahun (penjual bakso keliling) Tanggal 27 juni 2021

¹⁸ Wawancara , ibu Ifah 35 tahun (penjual nasi dan lauk pauk gerobak) Tanggal 27 juni 2021

¹⁹ Wawancara, bapak Samsudin 50 tahun (penjual cilok keliling) Tanggal 28 juni 2021

memilih menjadi Pedagang Kaki Lima . Pedagang Kaki Lima dapat juga dikatakan mampu menyerap tenaga kerja karena tidak sedikit diantara mereka yang sudah mempekerjakan orang lain sehingga dapat bahwa Pedagang Kaki Lima memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi pada khususnya menjadi penyokong pendapatan perekonomian pada umumnya..

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Table 1.3

Jumlah pedagang kaki lima

Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah Pedagang Kaki Lima
2015	980	50
2016	1100	98
2017	1120	100
2018	1210	127
2019	1230	202
2020	1450	90

Sumber : office kelurahan kejawan putih tambak tahun 2015-2020

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pedagang Kaki Lima dikota surabaya wilayah keluraha Kejawan Putih Tambak dari tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu mengalami penurunan yang drastis akibat adanya pandemi (covid 19) dan dibatasi untuk melakukan penjualan dipinggir jalan yang mana pada tahun 2015 jumlah pedagan kaki lima yaitu 50 dan terus meningkat sampai tahun 2019 yaitu dengan jumlah 202 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 90 karena adanya pandemi yang mana masyarakat diberi batasan untuk bepergian keluar rumah jika tidak ada kepentingan.

Table 1.4

Jumlah penduduk yang tidak berpenghasilan tetap

Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang tidak berpenghasilan tetap
2015	980	100
2016	1100	220
2017	1120	215
2018	1210	257
2019	1230	345
2020	1450	538

Sumber Dinas tenaga kerja kelurahan kejawan putih tambak

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran dikota surabaya wilayah kelurahan kejawan putih tambak dalam priode tahun 2015 hingga tahun priode 2020 tidk stabil dan mengalami fase naik turun , keadaan ini digambarkan pada tahun priode 2015 hingga tahun priode 2020 peningkatan pengangguran yang setengah drastis hingga tahun priode 2020 peningkatan yang sangat drastis yang disebabkan oleh karna adanya pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk kota surabaya wilayah kejawan putih tambak sehingga banyak warga masyarakat kejawan putih tambak yang kehilangan pekerjaan dan tidak bekerja sama sekali.

Table 1.5

Jumlah penduduk yang tidak berpenghasilan tetap yang bekerja sebagai PKL.

Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang tidak	Jumlah pedagang	Jumlah pekerja yang mampu

		berpenghasilan tetap	kaki lima	diserap
2015	980	100	50	50
2016	1100	220	98	122
2017	1120	215	100	115
2018	1210	257	127	130
2019	1230	345	202	143
2020	1450	538	90	448

Sumber : office kelurahan kejawan putih tambak

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima mampu menyerap jumlah pengangguran atau orang yang tidak berpenghasilan tetap dikota khususnya wilayah kelurahan kejawan tambak, setiap tahunnya seperti yang terjadi pada tahun 2015 yaitu menyerap sebanyak 50orang dan sampai tahun priode 2020 yaitu 448 yang mana mengalami penurunan drastis karena adanya pandemi (covid 19).

Peran pemerintah daerah Kelurahan Kejawan Putih Tambak untuk pedagang kaki lima adalah berusaha membuat masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima bisa menjual barang dagangannya dengan aman atau tanpa pajak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu pemerintah daerah Kelurahan Kejawan Putih Tambak juga mengizinkan para waga masyarakatnya untuk berjualan disekitar wilayah kejawan agar warga masyarakatnya tidak banyak yang mengalami pengangguran.

Selain itu, pemerintah daerah Kelurahan Kejawan Putih Tambak juga mempersilahkan jalan yang ada di sepanjang jalan kejawan Putih Tambak untuk dijadikan pasar malam setiap alam Ahad dan malam Senin.

Akan tetapi disamping pemerintah daerah mengizinkan untuk berjualan, pemerintah daerah juga menegakkan keamanan yang ketat

contohnya adanya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang mengontrol para penjual pedagang kaki lima. Tujuannya agar tercipta ketertiban, kebersihan, dan keamanan di sekitar jalan kejawan Putih Tambak. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan menyiapkan tempat khusus untuk para pedagang kaki lima di di jalan kejawan putih Tambak yang lokasinya di depan pondok Hidayatullah Surabaya dan depan area pemakaman yang bisa digunakan selama 24 jam.

Keberadaan para pedagang kaki lima ini turut serta mengurangi pengangguran di daerah kelurahan Kejawan Putih Tambak karena mereka juga merekrut karyawan dalam aktivitas dagang mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas kami menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) di kota Surabaya wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi pengangguran di kota Surabaya Wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, yaitu dengan memberikan izin kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan Kejawan Putih Tambak. Selain itu pemerintah setempat juga memberikan kenyamanan dan kermanan dengan menyediakan tempat khusus untuk para pedagang kaki lima yang bisa digunakan selama 24 jam. Pemerintah setempat juga mempersilahkan para pedagang kaki lima menyediakan tempat khusus untuk dijadikan pasar malam setiap malam Ahad dan malam Senin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Anwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikanto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
Rineka Cipta.

Creswell, John. 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi
ketiga*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Faisal, Sanafiah. 2010. *Format-Format Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

F.Siagian, Sondang. 1995. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Pres.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi.3*. Jakarta :
Penerbit Erlangga.

Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Milles, Matthew and Michel Huberman. 1984. *Qualitatif data Analisis*. Beverly Hills :
Sage Publication.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV
Alfabeta.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung:
Alfabeta.

Taniredja, Tukiran. 2010. *Penelitian Kualitatif, Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.

[http//.m.hukum.online.com](http://.m.hukum.online.com)

[http// eng.uir.ac.id](http://eng.uir.ac.id)

[http// www.foxsit.com](http://www.foxsit.com)

[http// media.neliti.com](http://media.neliti.com)

[http// id.m.wikipedia](http://id.m.wikipedia)

P ISSN : 2477 - 0469

E ISSN : 2581 - 2785

<http://jdih.baliprov.go.id>